

**STUDI PARTISIPASI POLITIK  
MASYARAKAT DI KAWASAN PANTAI  
(Kasus Pangkajene dan Galesong Utara)**

***THE STUDY OF POLITICAL PARTICIPATION  
OF THE COASTAL COMMUNITY  
(Cases in Pangkajene and North Galesong)***

ZAINUDDIN BOLONG \*

*Abstract*

*The aims of the study were to find out political participation of the coastal community through the pattern of the relationship between ponggawa (leader) and sawi (subordinates), the role of ponggawa in determining the intensity of political participation of his sawi, the impact of political culture on the political participation, the impact of political social environment on the political participation of the coastal community, and whether or not there is a correlation between the level of income and education with the political participation of the coastal community. The results of the study indicate that the political participation at the coastal community is high; however, most of their involvement in the political activities is still under mobilization. It can be concluded from the study that: (1) In general the political behavior of the ponggawa is followed by his sawi; (2) There is a strong correlation between political culture and political participation. Sociopolitical environment affects the intensity of the community political participation; (3) The levels of income and education of the community affect their political participation.*

*Key words : partisipasi politik, masyarakat pantai, budaya politik, ponggawa sawi.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Secara fisik, Indonesia adalah negeri kepulauan terbesar di dunia, terdiri atas 17.508 buah pulau dan perairan lautnya sekitar 3,1 juta km persegi atau 62% dari luas seluruh teritorialnya. Selain itu, berdasarkan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982) Indonesia mempunyai hak atau kewenangan memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km persegi, untuk eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan

sumber daya hayati dan nonhayati, penelitian, yurisdiksi mendirikan instalasi atau pulau buatan (Rokhmin Dahuri dkk, 1996).

Kebanyakan penduduk Indonesia bermukim di kawasan pantai sebagai warga masyarakat pantai dengan memanfaatkan sumber daya alam perairan laut dan darat ; baik secara serentak maupun secara bergantian menurut musim. Dalam hal ini, khususnya yang bermata pencaharian menangkap ikan di laut atau nelayan. Luas areal perikanan laut di Sulawesi Selatan seluruhnya adalah 707.150 mil dan yang termasuk areal perikanan pantai hanyalah 3.700 mil (M.A. Sallatang, 1976).

---

\* Staf pengajar FISIP Univ. Tadulako

Dengan melihat luasnya areal perikanan pantai tersebut, maka masyarakat pantai (*coastal community*) menempati posisi yang strategis dalam rangka pembangunan nasional terutama dari segi pertahanan dan keamanan nasional, mengingat Indonesia secara geopolitik adalah negara kepulauan (*archipelago state* atau *maritime state*). Oleh karena itu eksistensi masyarakat di kawasan pantai dapat dikatakan sebagai "pengawal pantai" (*coast guard*) dan sekaligus perisai (*shield*) bagi masyarakat pedalaman (*hinterland community*) yang berbatasan dengannya bila terjadi serangan dari luar.

Masyarakat pantai yang demikian itu dalam realitasnya sebagian besar mendiami wilayah administrasi pemerintahan desa sebagai unit birokrasi negara yang terendah yang juga memiliki LKMD sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan. LKMD adalah lembaga masyarakat di desa atau kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dan diharapkan menjadi wadah partisipasi mereka dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya masyarakat.

Pada kenyataannya, LKMD tidak memenuhi harapan itu terutama dalam pembinaan demokrasi yang berakar dari bawah (*grass roots democracy*). Untuk menjelaskan kemungkinan pembinaan demokrasi yang berakar dari bawah setidaknya pada tingkat lokal dalam hal ini masyarakat di kawasan pantai dapat didekati dengan meminjam pola hubungan timbal balik secara vertikal dalam bidang politik dan kekuasaan, seperti yang terwujud antara pemimpin dan orang yang dipimpin, antara *ajoareng* dengan *joa* (BB) atau antara *tunipinawang* dengan *tuminawang*, antara *karaeng* dengan *taunna* (BM). Mukhlis (1985) menggambarkan hubungan *patron-client* di masyarakat Bugis dan Makassar, yang populer dengan hubungan *pongawa-sawi* di kalangan masyarakat nelayan.

Pendapatan masyarakat pantai (nelayan) yang relatif rendah sekali berpengaruh pula

pada tingkat pendidikan menjadi rata-rata rendah. Bila pendapatan dan pendidikan rendah dapat diasumsikan bahwa partisipasi politik mereka rendah. Tetapi bagi masyarakat pantai yang masih terikat hubungan *pongawa-sawi* dimana budaya politik paternalistik masih dominan menyebabkan partisipasi politiknya tinggi, sebab mobilisasi politik dilakukan *patron (pongawa)* ke tempat-tempat pemungutan suara.

Penelitian tentang hubungan *pongawa-sawi* telah dilakukan oleh beberapa pakar. Resusun (1978), Basuni (1981), Sudarto (1982), mengkaji hubungan *pongawa-sawi* dalam fungsi ekonomi yaitu proses kerjasama produksi dan distribusi pendapatan bagi masyarakat nelayan. Chabot, Mattulada, dan Pelras (1981) mengkaji hubungan *pongawa-sawi* dari sudut pandang antropologi. Sallatang (1982) mengkaji kelompok *pongawa-sawi* dari sudut pandang sosiologi dengan penekanan pada kelompok kecil. Putera (1988) mengkaji hubungan *pongawa-sawi* dari segi sejarah dan politik. Munadah (1990) mengkaji hubungan *pongawa-sawi* dari segi ekologi manusia. Para peneliti yang telah disebutkan belum ada yang membicarakan hubungan *pongawa-sawi* dari segi politik, khususnya partisipasi politik, sehingga penulis berpendapat penelitian partisipasi politik masyarakat di kawasan pantai melalui pola hubungan *pongawa-sawi* perlu dilakukan.

### Rumusan Masalah

Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- (1) Bagaimanakah tingkat partisipasi politik masyarakat di kawasan pantai melalui pola hubungan *pongawa-sawi* ?
- (2) Apakah ada persamaan tingkah laku politik antara seorang *pongawa (patron)* dengan *sawinya (client)* khususnya dalam partisipasi politik pemberian suara (voting) dalam pemilu, kampanye, rapat-rapat umum, kegiatan organisasi sosial politik, diskusi politik, dan komunikasi

- dengan pejabat pemerintah dan administratif ?
- (3) Bagaimanakah pengaruh budaya politik terhadap partisipasi politik masyarakat di kawasan pantai ?
  - (4) Bagaimanakah pengaruh lingkungan sosial politik terhadap partisipasi politik masyarakat di kawasan pantai ?
  - (5) Apakah ada korelasi antara tingkat pendapatan dengan partisipasi politik dan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi politik ?

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### *Tujuan Penelitian*

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara deskriptif dan analitis :

- (1) Partisipasi politik masyarakat di kawasan pantai dalam arti yang luas melalui pola hubungan ponggawa-sawi, dan memperkirakan kematangan masyarakat berdemokrasi,
- (2) Peranan ponggawa dalam menentukan intensitas partisipasi politik para sawinya,
- (3) Pengaruh budaya politik terhadap partisipasi politik masyarakat di kawasan pantai ,
- (4) Pengaruh lingkungan sosial politik terhadap partisipasi masyarakat di kawasan pantai ,
- (5) Korelasi antara tingkat pendapatan dengan partisipasi politik dan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi politik.

#### *Kegunaan Penelitian*

- (1). Secara akademis, hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang partisipasi politik masyarakat pantai dan menjadi pelengkap dalam pengembangan teori partisipasi politik pada umumnya.
- (2). Maksud praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan merangsang pihak- pihak tertentu baik pemerintah maupun organisasi politik untuk lebih

rneningkatkan upaya pendidikan politik masyarakat pantai agar lebih sadar tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam hal ini berturut-turut akan dibahas partisipasi politik, budaya politik, lingkungan sosial politik, konsep ponggawa-sawi, patron-client, dan wilayah kawasan pantai.

Pembahasan mengenai partisipasi politik merujuk pada karya-karya Weiner (1971), Miriam Budiardjo (1981), Huntington dan Nelson (1977, 1984), Lerner (1958), Milbrath (1965), Nimmo (1989), Almond dan Verba (1984), dan Almond (dalam Mochtar Mas'od dan Collin McAndrews (ed),1983). Pembahasan mengenai budaya politik merujuk karya-karya Kantaprawira (1983), Almond dan Verba (terj. S. Simamora (1990), dalam Mochtar Mas'od dan Collin McAndrews,1983), dan Almond dan Powell (1966). Pembahasan mengenai lingkungan sosial politik merujuk karya-karya Rush dan Althof (1983), Almond (dalam Mochtar Mas'od dan Collin McAndrews,1983), Hess dan Torney (dalam Apter, 1985). Pembahasan mengenai konsep ponggawa-sawi merujuk karya-karya Chabot (1981), Mattulada (1981), Munadah (1990), dan Sallatang (1982). Pembahasan mengenai patron-client berdasarkan karya-karya Pelras ( 1981) , Putera (1988), Foster (1963), Campbell (1964), Boissevain (1966), Cohen (1966), Lande (1977), Wertheim (1969), Scott (1972), Gouldner (1977), dan Legg (1983). Pembahasan mengenai wilayah kawasan pantai merujuk karya-karya Mattulada (1988), dan Sallatang, dkk (1976).

### **KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **Kerangka Pemikiran**

Pada hakekatnya partisipasi politik dapat dibedakan pada dua kriteria, yaitu

partisipasi politik otonom (*autonomous political participation*), dan partisipasi politik mobilisasi (*mobilized political participation*).

Pada zaman pemerintahan "*orde baru*", tampaknya ciri dan makna partisipasi politik masyarakat terarah kepada pengertian yang kedua yaitu *partisipasi politik mobilisasi*. Konsekuensi ungkapan tersebut bermakna bahwa massa di Indonesia termasuk masyarakat pedesaan yang mayoritas semata-mata digerakkan oleh elite yang berkuasa. Dampak politis terhadap asosiasi kegiatan mobilisasi tersebut bagi masyarakat, khususnya dalam konteks politik, pada satu sisi dapat menimbulkan partisipasi politik yang cukup besar sebagai akibat mobilisasi, di sisi lain dapat pula terwujud suatu keadaan yang disebut krisis politik yang memungkinkan berubah menjadi apatis total terhadap kegiatan politik.

Mengenai masalah mobilisasi politik pada masyarakat desa bermakna bahwa adanya figur yang memobilisasinya. Figur tersebut biasanya melekat pada diri kepala desa (pemimpin formal), atau biasa juga pengaruh pimpinan informal (*pongawa* terhadap para *sawinya*) yang dipandang sebagai bapak/tokoh oleh masyarakat/kelompok pengikutnya. Ini berarti budaya politik paternalistik dikalangan masyarakat desa dapat digunakan sebagai bahan identifikasi partisipasi politik.

Oleh karena itu menelaah partisipasi politik masyarakat pantai melalui pola hubungan *pongawa-sawi*, tidak terlepas dari pengaruh budaya politik dan lingkungan sosial politik. Individu ketika berpartisipasi politik mungkin aktif atau mungkin pula pasif. Jika dikaji mengapa individu tersebut berada pada salah satu diantara dua posisi itu, maka perlu diajukan budaya politik dan lingkungan sosial politik sebagai acuan alternatif penyebabnya.

Aspek lainnya yang mempengaruhi partisipasi politik adalah pendapatan dan pendidikan. Seseorang yang berpendapatan dan berpendidikan tinggi cenderung lebih aktif melakukan kegiatan-kegiatan politik daripada orang yang berpendapatan dan berpendidikan

rendah. Namun demikian tidak menutup kemungkinan seseorang yang memiliki tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah mempunyai tingkat partisipasi politik yang tinggi, karena pendapatan dan pendidikan mereka dikontrol atau dikendalikan oleh pihak lain (*pongawa* terhadap *sawinya*) sehingga keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan politik atas anjuran pihak lain.

### Hipotesis

Penelitian ini menampilkan 5 (lima) hipotesis sebagai berikut :

Terdapat persamaan tingkah laku politik antara seorang *pongawa* (*patron*) dengan para *sawinya* (*client*), khususnya dalam partisipasi politik.

- Hipotesis II : Budaya politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat pantai.
- Hipotesis III : Lingkungan sosial politik mempengaruhi intensitas partisipasi politik masyarakat pantai.
- Hipotesis IV : Terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat pendapatan dengan partisipasi politik masyarakat pantai.
- Hipotesis V : Terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi politik masyarakat pantai.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Pangkajene Kabupaten Dati II Pangkajene dan Kepulauan dan wilayah Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Dati II Takalar. Kedua wilayah kecamatan tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan mudah terjangkau dari kota Makassar dengan jarak masing-masing 56 Km (Pangkajene) dan 21 Km (Galesong Utara).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk masyarakat pantai yang bermukim di wilayah Kecamatan Pangkajene

dan Kecamatan Galesong Utara, dengan unit analisis adalah seluruh Kepala Keluarga (KK).

Penentuan sampel dilakukan dengan cara acak berstrata (*stratified random sampling*), mengingat populasi terdiri atas strata *pongawa*, *sawi*, dan nelayan mandiri/pancing. Untuk sampel (responden) *pongawa* diambil secara acak sebanyak 60 KK. Sedangkan sampel (responden) *sawi* juga diambil secara acak sebanyak 60 KK. Untuk sampel nelayan mandiri diambil secara acak sebanyak 30 KK. Sehingga jumlah responden semuanya sebanyak 150 KK.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data pendukung lainnya. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) baik terhadap responden (*pongawa*, *sawi*, dan nelayan mandiri) maupun informan (tokoh masyarakat, kepala kelurahan/desa, dan perangkat kecamatan). Selain itu dilakukan pengedaran kuesioner dan observasi partisipasi. Pengumpulan data lainnya dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen dan laporan tertulis pada berbagai organisasi atau unit kerja yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) *Analisis deskriptif kualitatif*, untuk mengukur tingkat partisipasi politik, budaya politik, lingkungan sosial-politik, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan masyarakat di kawasan pantai dengan menggunakan tabel-tabel frekuensi dan persentase.
- 2) *Analisis statistik inferensial* dengan menggunakan *Chi Kuadrat*, untuk menguji hipotesis " dengan taraf signifikan 5%. Nilai hitung *Chi Kuadrat* dijabarkan berdasarkan rumus  $X^2$  (Sugiyono, 1992 : 172)

sebagai berikut :

$$X^2 = \frac{\sum (fo - fh)^2}{Fh}$$

Dimana :

$X^2$  = Chi Kuadrat

fo = Frekuensi yang diobservasi/diperoleh, baik melalui pengamatan maupun melalui angket, wawancara.

fh = Frekuensi yang diharapkan.

- 3) Analisis hubungan variabel dengan menggunakan statistik korelasi product moment untuk menguji hipotesis II, III, IV, dan V, adanya hubungan antara variabel X (budaya politik, lingkungan sosial-politik tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan) dengan variabel y (partisipasi politik) dengan taraf signifikan 5%. Nilai hitung koefisien korelasi dijabarkan berdasarkan rumus  $r_{xy}$  (Sugiyono 1992 : 142)

sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{\sum XY}{\sqrt{(\sum X^2)(\sum Y^2)}}$$

Dimana :

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y.

$\sum xy$  = Jumlah product dari variabel X dan variabel Y.

$\sum X^2$  = Jumlah kuadrat variabel X.

$\sum y^2$  = Jumlah kuadrat variabel Y.

## PROFIL LOKASI PENELITIAN

### Pangkajene

Kecamatan Pangkajene merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Luas wilayah Kecamatan Pangkajene 47,39 km<sup>2</sup> terdiri atas 9 kelurahan, 17 lingkungan 41 RW dan 171 RT. Kecamatan ini pada umumnya dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut. Jumlah penduduk Kecamatan ini sebanyak 32.756 jiwa (data statistik, 1995). Kecamatan ini adalah kecamatan yang terpadat penduduknya (691 jiwa/km<sup>2</sup>) di Kabupaten Pangkep.

### **Galesong Utara**

Galesong Utara merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar.

Luas wilayah Galesong Utara 21,75 km<sup>2</sup>, kurang lebih 3,84% dari luas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar. Kecamatan ini terdiri atas 9 desa, 30 dusun, 100 RK dan 239 RT, dengan ketinggian rata-rata 211,11 m dari permukaan air laut. Jumlah penduduk kecamatan ini adalah 32.808 jiwa (registrasi penduduk 1995). Kecamatan ini adalah kecamatan yang terpadat penduduknya (1.504 jiwa/km<sup>2</sup>) di Kabupaten Takalar.

### **Eksistensi Organisasi Sosial -Politik**

Pada awal kemerdekaan 1945-1957, tidak semua partai politik mempunyai cabang di Pangkajene dan di Galesong Utara. Sebagai gambaran, pada Pemilu 1955, pada tingkat nasional diikuti oleh 28 partai politik, akan tetapi pada tingkat lokal khususnya di Makassar termasuk Pangkajene dan Galesong Utara hanya diikuti oleh 9 (sembilan) partai politik, yaitu Masyumi, Nahdatul Ulama (NU), PSII, PNI, PKI, Parkindo, PKR, Partai Katholik, dan PSI. Dari 9 (sembilan) partai politik tersebut, hanya 4 (empat) partai politik memperoleh suara cukup besar yaitu : Masyumi 32,73% suara, Nahdatul Ulama (NU) 15,51% suara, PSII 13,27% suara, dan Parkindo 9,22% suara. Besarnya dukungan suara yang diperoleh Masyumi, NU, dan PSII sebagai partai Islam, karena penduduk Pangkajene dan Galesong Utara mayoritas beragama Islam, dan juga para *patron* (Ponggawa) mendukung salah satu diantara ketiga partai tersebut.

Pada Pasca Orde Baru dan di awal reformasi muncul lebih dari 100 (seratus) partai politik. Berdirinya begitu banyak partai politik karena UU No.2 Tahun 1999 tentang partai politik memungkinkan hal itu. Namun demikian, setelah melalui seleksi yang ketat oleh KPU, hanya 48 partai politik memenuhi syarat untuk ikut serta dalam Pemilu 1999 sesuai UU No.3 Tahun 1999 tentang pemilu.

Dari 48 partai politik, hanya 37 partai politik memiliki cabang di Pangkajene dan 32 partai politik yang memiliki cabang di Kabupaten Takalar (Galesong Utara adalah bagian wilayah dari Kabupaten Takalar). Partai politik di era reformasi ini diperbolehkan mendirikan cabang ataupun perwakilan/komisaris di tingkat kecamatan dan desa untuk menggarap massa di tingkat desa.

### **Hasil Pemilihan Umum (Pemilu)**

Pada Pemilu 1971, PPP memperoleh suara terbanyak (52,77%) di Pangkajene kemudian diikuti oleh Golkar 44,63% suara, dan PDI hanya 2,60% suara. Kemenangan PPP pada pemilu tersebut karena wilayah kecamatan itu merupakan basis PSII dan NU yang fanatik dengan agama Islam.

Namun demikian pada Pemilu 1977 hingga Pemilu 1997, baik di Pangkajene maupun di Galesong Utara, PPP maupun PDI mengalami penurunan yang sangat tajam dalam hal perolehan suara sehingga Golkar muncul sebagai pemenang mutlak. Kemenangan Golkar pada pemilu tersebut (Pemilu 1977 hingga Pemilu 1997) tidak terlepas dari tekanan-tekanan pemerintah sipil dan ABRI terhadap partai politik. Selain itu cara-cara represif juga dilakukan aparat terhadap rakyat, terutama di pedesaan. Demikian pula kecurangan dalam perhitungan suara sangat menguntungkan Golkar.

Pada Pemilu 1999, merupakan pemilu pertama di era reformasi, partai Golkar memperoleh suara terbanyak, baik di Pangkajene maupun di Galesong Utara. Sebagai gambaran, di Kecamatan Pangkajene, jumlah suara untuk DPR, Golkar memperoleh 73,72%, PPP 8,45%, PAN 4,29%, PBB 2,45%, dan PDIP dan PSII hanya menempati urutan ke-5 dalam hal perolehan suara. Demikian halnya di Galesong Utara, Golkar unggul dalam perolehan suara, yaitu 64,91%, Kemudian diikuti oleh PDIP 9,16% suara, PPP 7,45% suara, PSII 3,39% suara, dan PAN 2,08% suara.

Di Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar, Golkar muncul sebagai pemenang mutlak pada semua pemilu. Sebagai gambaran, pada Pemilu 1971, PPP masih memperoleh 28,68% suara, sedangkan Golkar telah memperoleh 69,18% suara, dan PDI memperoleh 0,78% suara. Pada pemilu berikutnya (Pemilu 1977 hingga Pemilu 1997), PPP mengalami penurunan tajam dalam hal perolehan suara, sebaliknya Golkar mengalami peningkatan drastis dalam perolehan suara, sedangkan PDI pada semua pemilu selama Orde Baru memperoleh suara kurang dari 1%. Hasil pemilu 1999, menunjukkan bahwa Golkar tetap pemenang di Kabupaten Pangkep dengan perolehan suara 99.348 (20 kursi) kemudian disusul PPP 15.608 suara (3 kursi), PAN 2.944 suara (1 kursi), PDI-P 2.592 suara (1 kursi), PBB 1.729 suara (1 kursi), PSII 1.490 suara (1 kursi). Demikian juga di Kabupaten Takalar, hasil pemilu 1999 menunjukkan Golkar tetap pemenang dengan perolehan suara 87.798 (20 kursi), kemudian disusul PPP 6.210 suara (2 kursi), PDI-P 3.595 suara (1 kursi), IPKI 3.187 suara (1 kursi), PDR 2.878 suara (1 kursi), PAN 2.437 suara (1 kursi), dan PSII 1.926 suara (1 kursi).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kesadaran Politik

Ukuran tingkat kesadaran politik masyarakat di kawasan pantai dalam kegiatan-kegiatan politik didasarkan pada sejauh mana manfaat yang mereka peroleh dengan menggunakan lembaga-lembaga politik yang ada sebagai usaha merubah kondisi kehidupan untuk meraih kesempatan-kesempatan politis. Tampaknya masyarakat di kawasan pantai menggunakan momen politik melalui pola hubungan ponggawa sawi sebagai bagian dari tuntutan menunaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Keterlibatan mereka dalam kegiatan pemberian suara (voting), kegiatan kampanye pemilu, kegiatan organisasi sosial politik, diskusi politik, dan kontak politik langsung, telah memungkinkan

melakukan tuntutan-tuntutan politik, namun belum maksimal secara intens melakukan tuntutan-tuntutan itu melalui lembaga-lembaga politik yang ada, karena perilaku politik mereka sebagian besar merupakan refleksi mobilisasi politik. Tuntutan-tuntutan politik lebih banyak dilakukan oleh *ponggawa (patron)* mereka yang sekaligus membawakan dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan *sawinya (clientnya)* melalui lembaga-lembaga yang ada. Mereka menyadari bahwa sistem yang ada memberi akses bagi aspirasi dan kepentingannya bilamana disalurkan dan diperjuangkan oleh *ponggawa (patron)* mereka. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang turut memberi andil terhadap terpeliharanya dan dipertahankannya jalinan hubungan *ponggawa-sawi* di kalangan masyarakat pantai, karena adanya manfaat, baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung dari hubungan tersebut.

### Kegiatan Partisipasi Politik

#### *Pemberian suara (voting)*

Tingginya partisipasi masyarakat di kawasan pantai dalam aktivitas pemberian suara berdasarkan minat dan manfaat, tidak dapat dipisahkan dengan aspek mobilisasi massa yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun para *ponggawa* terhadap *sawinya* (aspek mobilisasi politik dan partisipasi politik tidak dipertentangkan satu sama lain dalam penelitian ini). Mobilisasi massa ketempat-tempat pemungutan suara yang dilakukan oleh pemerintah dan para *ponggawa* turut menentukan kemenangan suara salah satu kontestan atau partai politik. Hal ini cukup beralasan mengingat masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, dan lebih khusus bagi masyarakat di kawasan pantai masih melekat budaya politik paternalistik yang terjelma dalam pola hubungan *ponggawa-sawi*.

#### *Partisipasi Dalam Kampanye*

Masyarakat di kawasan pantai, terutama di Pangkajene dan Galesong Utara cukup aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye pemilu, terlebih jika kampanye pemilu itu dilakukan

oleh organisasi politik atau partai politik yang tokoh-tokohnya adalah panutan mereka, terutama partai politik yang didukung oleh para *pongawa*. Dari 150 responden, terdapat 46,7% dan 32,7% menyatakan sangat tinggi dan tinggi keterlibatannya dalam kegiatan kampanye pemilu. Dan hanya 12% dan 8,7% responden terlibat dalam kadar rendah dan cukup dalam mengikuti kegiatan tersebut.

Tingginya keikutsertaan masyarakat di kawasan pantai dalam kegiatan kampanye pemilu, juga tidak lepas dari adanya aspek mobilisasi. Masyarakat di kawasan pantai sangat aktif melakukan kegiatan politik jika kegiatan politik yang berlangsung dimotori dengan melibatkan *pongawa* dan pemerintah sebagai *patron* mereka. Tampaknya *pongawa* sebagai *patron* para *sawinya*, memegang peranan penting dalam aspek mobilisasi massa dikalangan masyarakat pantai dalam berbagai aktivitas politik.

#### *Partisipasi Dalam Kegiatan Organisasi Sosial dan Politik*

Partisipasi masyarakat di kawasan pantai dalam setiap kegiatan-kegiatan orsospol dinilai cukup aktif. Sebagai gambaran, dari 150 responden terdapat 24% dan 45,34% responden sangat tinggi dan tinggi keterlibatannya dalam kegiatan orsospol, 15,33% cukup, 5,33% dan 10% masing-masing rendah dan sangat rendah keterlibatannya dalam setiap kegiatan seperti itu.

Gambaran partisipasi dalam kegiatan orsospol di atas, didasarkan pada minat/motivasi, kesadaran akan manfaat, dan peranan/kedudukan mereka dalam aktifitas itu. Kesemuanya itu tidak lepas aspek mobilisasi yang dilakukan dalam kerangka hubungan *pongawa-sawi*. Singkatnya masyarakat di kawasan pantai cukup antusias terlibat dalam aktifitas-aktifitas orsospol yang diprakarsai dan dimotori oleh baik pemerintah maupun para *pongawa (patron)* mereka.

#### *Kontak Politik Langsung*

Tingkat kualitas kontak politik langsung masyarakat di kawasan pantai dapat

digambarkan bahwa dari 150 responden terdapat 16,7% dan 46,7% sangat tinggi dan tinggi, 18% cukup, 14,7% dan 4% rendah dan sangat rendah tingkat keterlibatannya dalam kegiatan politik langsung.

#### *Diskusi-Diskusi Politik*

Tingkat keterlibatan masyarakat di kawasan pantai dalam mengikuti diskusi-diskusi politik dapat digambarkan sebagai berikut : Dari 150 responden yang dilibatkan dalam penelitian ini, terdapat 21,33% dan 52% responden sangat tinggi dan tinggi, 13,34% responden cukup, 8% dan 5,33% responden masing-masing rendah dan sangat rendah keterlibatannya mengikuti diskusi-diskusi politik. Dari data tersebut menunjukkan, tampaknya masyarakat cukup berminat termotivasi membicarakan persoalan-persoalan politik, karena ada manfaat yang mereka peroleh dari kegiatan itu. Karena diskusi-diskusi politik paling sering terjadi di lingkungan pekerjaan (lingkungan fungsional spesial) maka paling kurang ada 2 (dua) manfaat penting yang diperoleh, yaitu : (1) dapat menambah pengetahuan dan wawasan politik mereka (2) ada kaitannya dengan pekerjaan mereka, khususnya *sawi* yang *pongawanya* gemar membicarakan persoalan-persoalan politik.

#### *Kegiatan Rapat-Rapat Umum*

Masyarakat di kawasan pantai senantiasa terlibat dalam kegiatan rapat-rapat umum. Sebagai gambaran, dari 150 responden, terdapat 20,7% sangat tinggi dan 54% tinggi. Selanjutnya, 12,7% responden cukup terlibat, 11,3% rendah, dan hanya 1,3% sangat rendah keterlibatannya dalam kegiatan rapat-rapat umum. Responden yang sangat tinggi dan tinggi keterlibatannya dalam kegiatan tersebut, kebanyakan berasal dari kelompok *pongawa*. Kelompok *pongawa* inilah sebagai agen penggerak massa, terutama menggerakkan *sawinya* untuk mengikuti rapat-rapat umum.

Kemudian, untuk mengetahui adanya persamaan partisipasi politik antara kelompok *pongawa* dengan kelompok *sawi*, kedua data

tersebut disilangkan melalui tabel silang yang selanjutnya dihitung dengan menggunakan teknik perhitungan Chi-Kuadrat ( $X^2$ ) dengan bantuan komputer program SPSS+. Hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai chi-kuadrat hitung ( $X^2$  hitung) sebesar 13,01865. Sedangkan nilai kritik Chi-kuadrat ( $X^2$  tabel) dengan taraf signifikan 5% dan D.F atau D.B = 3, diperoleh hasil sebesar 7,815 ( $X^2$  tabel = 7,815). Ini berarti  $X^2$  hitung jauh lebih besar jika dibandingkan dengan  $X^2$  tabel ( $X^2$  hitung >  $X^2$  tabel atau 13,018 > 7,815) atau hasilnya sangat signifikan.

Hipotesis I. Terdapat Persamaan tingkah laku politik (partisipasi politik) antara seorang *pongawa* dengan para *sawinya*.

Hipotesis statistik :

Ho:  $P = 0 \rightarrow$  Tidak terdapat persamaan tingkah laku politik antara seorang *pongawa* dengan para *sawinya*.

H<sub>1</sub>:  $p \neq 0 \rightarrow$  Terdapat persamaan tingkah laku politik antara seorang *pongawa* dengan para *sawinya*.

Berdasarkan hasil perhitungan Chi-kuadrat di atas  $X^2$  hitung (13,01865) >  $X^2$  (0,05) pada tabel (7,815), karena  $X^2$  hitung >  $X^2$  pada taraf signifikan 0,05, maka hipotesis Ho ditolak dan Hipotesis H<sub>1</sub> diterima berarti terdapat persamaan tingkah laku politik antara seorang *pongawa* dengan para *sawinya*, sehingga hipotesis I yang telah dirumuskan diatas dapat diterima. Dengan diterimanya hipotesis ini memberi keyakinan yang kuat kepada penulis bahwa tingkah laku politik seorang *pongawa* (*patron*) secara keseluruhan (*enbloc*) diikuti oleh para *sawinya* (*client*). Demikian pula sebaliknya, seorang *sawi* baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam suatu kegiatan politik paling kurang mendapat respon positif dari *pongawanya*. Kegiatan ini menunjukkan, hubungan *pongawa-sawi* dikalangan masyarakat pantai yang terjalin sejak dulu, masih tetap terpelihara dan dipertahankan, bukan hanya di bidang ekonomi dan pertanian, tetapi juga di bidang politik, khususnya partisipasi politik.

## Wujud budaya politik

### Pandangan Politik

Tingkat kualitas pandangan politik masyarakat di kawasan pantai telah berada pada dataran yang tinggi. Hal ini tampak dengan jelas bahwa dari 150 responden, terdapat 37,3% dan 38% responden sangat tinggi dan tinggi kualitas pandangan politiknya. Ini berarti lebih dari separuh responden sangat tinggi dan tinggi kualitas pandangan politiknya, 18% responden cukup, 5,3% responden rendah, dan hanya 1,3% responden sangat rendah kualitas pandangan politiknya. Gambaran pandangan politik di atas memberi indikasi bahwa pandangan politik masyarakat di kawasan pantai telah mengalami transformasi (perubahan). Di masa yang lalu, baik pada masa "*orde lama*" maupun pada masa "*orde bani*", kejadian-kejadian politik diinterpretasikan oleh mereka sebagai bagian dari program pemerintah. Sementara apapun yang dilakukan pemerintah dipandang benar adanya tanpa perlu melakukan lagi kajian ulang. Konsekuensi pandangan demikian adalah kejadian politik yang bukan dimotori pemerintah tidak dipandang sebagai pembawa kebaikan karena memiliki resiko yang berat. Setelah lengsernya Soeharto dari jabatan kepresidenan dan memasuki era reformasi, pandangan politik masyarakat di kawasan pantai mengalami perubahan ke arah yang lebih positif. Mereka memandang kejadian-kejadian politik bukan hanya yang dimotori pemerintah dapat membawa kebaikan dan keuntungan tetapi juga kejadian politik yang bukan dimotori pemerintah. Kesan ini membentuk penafsiran lanjutan tentang potensi politik individu dan kelompok serta posisi sistem politik.

### Sikap-Sikap Politik

Sikap politik masyarakat di kawasan pantai dalam kaitannya dengan pengaruh terhadap partisipasi politiknya, cukup menggembirakan. Sebagai gambaran, dari 150 responden, terdapat 37,3% dan 30%

responden sangat tinggi dan tinggi kualitas sikap membawa angin segar bagi kehidupan politik. Era ini (era reformasi) merupakan era keterbukaan dengan tekad ingin menegakkan demokrasi yang didambakan masyarakat. Keadaan ini telah membawa perubahan bagi masyarakat, terutama perubahan sikap dan perilaku masyarakat di kawasan pantai yang berpengaruh pada potensi politik individu, potensi politik kelompok, dan sikap terhadap keberadaan atau posisi sistem politik.

#### *Nilai-Nilai Politik*

Tingkat kualitas nilai-nilai politik masyarakat di kawasan pantai menunjukkan, bahwa dari 150 responden, terdapat 16% dan 44% sangat tinggi dan tinggi kualitas nilai-nilai politiknya, 28,7% berada dalam kategori cukup, 10,7% rendah, dan 0,7% sangat rendah. Data ini memberi gambaran, tingkat kualitas nilai-nilai politik masyarakat di kawasan pantai berada dalam kategori tinggi, artinya kualitas nilai-nilai politik baik secara individu maupun kelompok merupakan hasil akumulasi dari nilai-nilai (budaya) yang melekat dan dianut mereka yang diaplikasikan dalam kehidupan politik. Nilai-nilai kultural inilah yang dominan membentuk budaya politik masyarakat di kawasan pantai yang diwujudkan dalam hubungan *pongawa-sawi*. Nilai-nilai kultural yang dimaksud adalah *Pangngaderreng* (bugis) atau *Pangngadakang* (Makassar) merupakan norma dan aturan adat-istiadat. Nilai-nilai utama lainnya yang menopang tegaknya *Pangngaderreng/pangngadakang* adalah *Alempureng* (kejujuran), *Amaccangeng* (kecendekiaan), politiknya, 21,3% cukup, 10,7% rendah, dan hanya 0,7% sangat rendah kualitas sikap politiknya.

Dari data-data tersebut di atas, memberi gambaran bahwa sikap-sikap politik masyarakat di kawasan pantai pada khususnya dan masyarakat Sulawesi Selatan pada

umumnya telah mengalami transformasi. Di masa lalu masyarakat mengalami tekanan, penindasan, dan pergolakan dalam kurun waktu yang lama, merupakan pengalaman pahit dan buruk yang tidak dapat dilupakan begitu saja. Berbagai macam peristiwa, seperti pemberontakan DI/TII (pimpinan Kahar Muzakkar), G 30 S/PKI, menyebabkan rakyat mengalami trauma yang secara langsung mempengaruhi kehidupannya, terutama kehidupan politiknya. Dalam kondisi dimana masyarakat selalu merasa tertekan menyebabkan mereka seolah menjadi kumpulan individu yang amat peka dan mudah curiga terhadap setiap unsur baru, terutama yang bermuatan politik. Selain itu mereka juga berkeinginan untuk selalu menegakkan "*Upangngadereng*" (bahasa Bugis) atau "*Upangngadakkang*" (bahasa Makassar) dan nilai-nilai utama lainnya sebagai pedoman dan pegangan hidup mereka. Akibatnya terbentuk dua macam sikap dan perilaku, yaitu sikap agresif dan sikap apatis. Dalam perkembangan selanjutnya, proses modernisasi semakin gencar dilaksanakan terutama pada masa pemerintahan orde baru. Berbagai kemajuan telah dicapai termasuk bidang ekonomi, namun hanya dinikmati oleh segelintir orang. Selain itu masyarakat tidak hanya memerlukan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi mereka juga memerlukan pemenuhan kebutuhan lainnya, termasuk kehidupan politiknya. Kebutuhan tersebut tampaknya belum bisa terwujud karena penguasa ketika itu masih terlalu kuat dan tidak memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyatnya untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan politik. Setelah tumbang pemerintah otoriter (orde baru), dan digantikan oleh pemerintahan reformasi telah *Assitinajang* (kewajaran), *Agettengeng* (keteguhan), usaha (*reso*), dan *siri*, atau harga diri (Rahman Rahim, 1985).

*Pangngaderreng/pangngadakang* dengan kelima unsurnya dan nilai-nilai utama lainnya, telah membentuk budaya politik masyarakat di kawasan pantai pada khususnya dan Bugis-

Makassar pada umumnya. Nilai-nilai tersebut telah mengalami transformasi dalam penerapannya sesuai perjalanan waktu, akan tetapi prinsip dasar dari nilai-nilai kultural itu tidak mengalami perubahan. Yang berubah sebetulnya hanyalah cara-cara individu dan masyarakat mengaplikasikan nilai-nilai kultural itu sesuai perkembangan zaman. *Pangngadereng/pangngadakang* dan nilai-nilai utama lainnya sebagai pedoman dan pandangan hidup yang membentuk kepribadian individu dan kelompok yang kemudian menuntun mereka dalam menentukan sikap dan perilaku, termasuk sikap dan perilaku politiknya yang terjalin dalam pola hubungan *pongawa-sawi*.

#### *Pengaruh Budaya Politik terhadap Partisipasi Politik*

Dalam mengukur hubungan pengaruh budaya politik terhadap partisipasi politik masyarakat di kawasan pantai, digunakan cara sebagai berikut : Data-data mengenai kedua variabel tersebut dihubungkan kemudian dilanjutkan dengan teknik perhitungan statistik korelasi product moment dengan bantuan program SPSS+. Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai koefisien korelasi ( $r_x$  hitung) sebesar 0,9233. Taraf signifikan 0,05 dan  $N = 150$ , maka nilai  $r_x$  tabel sebesar 0,159.

Hipotesis II. Budaya politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat pantai.

Hipotesis statistik :

$H_0: p = 0 \rightarrow$  Tidak ada pengaruh budaya politik terhadap partisipasi politik masyarakat pantai.

$H_1: P \neq 0 \rightarrow$  Ada pengaruh budaya politik terhadap partisipasi politik masyarakat pantai.

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi *product moment*  $r_x = 0,9233$  dengan nilai  $P = 0,000$  (output computer)  $< 0,05$  yang berarti hasil pengujian signifikan. Data mendukung adanya hubungan positif antara budaya politik terhadap partisipasi politik, maka Hipotesis  $H_0$

ditolak dan Hipotesis  $H_1$  diterima. Berarti ada pengaruh positif budaya politik terhadap partisipasi politik masyarakat pantai, sehingga hipotesis  $H_1$  yang telah dirumuskan diatas dapat diterima. Diterimanya hipotesis tersebut memberi indikasi yang kuat bahwa masyarakat di kawasan pantai masih memiliki budaya politik *paternalistik*, yang mana memandang pemimpinnya (*pongawanya*) sebagai sosok yang patut didengar dan diteladani sepanjang pemimpin (*pongawa*) tersebut memegang kuat nilai-nilai kultural yang ada dalam *Pangngadereng/Pangngadakang* dan nilai-nilai utama lainnya seperti kejujuran, kecendekiaan, kepatutan, keteguhan, usaha, dan siri.. Karena itu keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan politik tidak lepas dari pengaruh budaya politik *paternalistik*, dimana keterlibatannya lebih dominan digerakkan oleh pemimpinnya (*pongawanya*).

#### **Gambaran lingkungan Sosial-Politik**

*Lingkungan Keluarga (persekutuan genealogis).*

Pengaruh lingkungan keluarga sebagai struktur sosialisasi pertama yang dialami individu-individu pada masyarakat di kawasan pantai berada dalam kategori sangat tinggi. Artinya pengaruh keluarga sangat kuat dalam mensosialisasikan dan menanamkan norma-norma dan nilai-nilai kultural yang ada dalam *pangngadereng/pangngadakang* sebagai pedoman hidup yang membentuk sikap dan kepribadian anggota keluarga. Sebagai gambaran, dari 150 responden, terdapat 50% dan 28% sangat tinggi dan tinggi, 28,7% masing-masing cukup tinggi dan rendah pengaruh keluarga dalam mensosialisasikan nilai-nilai kultural yang dimaksud di atas.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa lingkungan keluarga (*persekutuan genealogis*) memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan sikap dan kepribadian masyarakat di kawasan pantai, dan diapresiasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik.

### *Lingkungan Tempat Tinggal (lingkungan territorial)*

Perolehan data mengenai gambaran kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat di kawasan pantai menunjukkan, dari 150 responden terdapat 53,3% sangat tinggi, 23,3% tinggi, 16,7% cukup, dan 6,7% responden rendah pengaruh lingkungan tempat tinggalnya. Data tersebut memberi gambaran bahwa lingkungan tempat tinggal masyarakat di kawasan pantai cukup berperan dalam memberikan pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan nilai-nilai politik yang membentuk kepribadian, sikap-sikap dan perilaku politik anggota masyarakat.

### *Lingkungan Pekerjaan (lingkungan fungsional spesial).*

Pada masyarakat di kawasan pantai yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan merupakan suatu lingkungan pekerjaan yang di dalamnya terjadi interaksi, baik antar sesama nelayan, antar nelayan mandiri dengan *sawi*, maupun antar *sawi* dengan *pongawanya*. Hubungan yang terjadi dalam lingkungan pekerjaan dilakukan melalui pola hubungan *pongawa-sawi* dan memiliki andil dalam proses pengalihan dan penyerapan nilai-nilai pengetahuan dan sikap-sikap politik.

Berdasarkan hasil perolehan data menunjukan bahwa dari 150 responden, terdapat 54,7% sangat tinggi, 20% tinggi, 12% cukup, 4,7% dan 8,7% responden rendah dan sangat rendah kualitas pengaruh lingkungan pekerjaannya dalam proses sosialisasi politik. Data tersebut memberi gambaran bahwa tingkat kualitas lingkungan pekerjaan dalam proses sosialisasi politik termasuk tinggi. Artinya lingkungan pekerjaan atau lingkungan fungsional spesial mempunyai andil dalam proses sosialisasi, termasuk sosialisasi politik. Dalam lingkungan pekerjaan ini pula terjalin secara kuat hubungan *pongawa-sawi* dan juga merupakan salah satu saluran komunikasi informasi bagi masyarakat di kawasan pantai.

### *Media Massa*

Perolehan data mengenai pengaruh media massa di kalangan masyarakat di kawasan pantai menunjukkan bahwa dari 150 responden yang dilibatkan dalam penelitian ini menyatakan pernah kontak dengan media massa, akan tetapi hanya 6% dan 26,7% responden sangat tinggi dan tinggi kualitas pengaruh media tersebut, 41,3% responden berada dalam kategori cukup, 16% rendah, dan 10% sangat rendah. Bila dicermati data ini tampak bahwa lebih dari separuh (mulai dari kategori cukup hingga sangat rendah) masih berada dalam kategori rendah kualitas pengaruh media massa dalam proses sosialisasi politik. Media massa seperti surat kabar dan majalah, radio, televisi, belum terandalkan dalam memberikan pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap politik. Hal ini di sebabkan karena kemampuan untuk menjangkau dan memiliki media tersebut (surat kabar, majalah dan televisi) masih rendah dikalangan masyarakat pantai, karena terkait dengan tingkat pendapatan mereka yang masih rendah.

### *Pengaruh Lingkungan Sosial Politik Terhadap Partisipasi Politik.*

Dalam mengukur hubungan pengaruh lingkungan sosial politik terhadap partisipasi politik masyarakat di kawasan pantai digunakan cara sebagaimana dalam mengukur hubungan pengaruh budaya politik terhadap partisipasi politik. Hasil perhitungan menunjukkan nilai koefisien korelasi ( $r_x$  hitung) sebesar 0,9366. Taraf signifikan 5% dan  $N = 150$ , diperoleh nilai  $r_x$  tabel sebesar 0,159.

Hipotesis III. Lingkungan sosial politik mempengaruhi intensitas partisipasi politik masyarakat pantai.

Hipotesis statistik :

$H_0 : p = 0 \rightarrow$  Tidak ada pengaruh lingkungan sosial politik terhadap partisipasi politik masyarakat pantai.

$H_1 : p \neq 0 \rightarrow$  Ada pengaruh lingkungan sosial politik terhadap partisipasi politik masyarakat pantai.

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi

*product moment*  $r_x = 0,9366$  dengan nilai  $p = 0,000$  (output computer)  $< 0,05$  yang berarti hasil pengujian signifikan. Data mendukung adanya hubungan positif antara lingkungan sosial politik terhadap partisipasi politik, maka Hipotesis  $H_0$  ditolak dan Hipotesis  $H_1$  diterima. Berarti ada pengaruh lingkungan sosial politik terhadap partisipasi politik masyarakat pantai, sehingga hipotesis III yang telah dirumuskan diatas dapat diterima. Diterimanya hipotesis tersebut memberi keyakinan kuat bahwa lingkungan sosial politik masyarakat di kawasan pantai sangat mendukung terhadap berlangsungnya proses sosialisasi politik. Lembaga sosialisasi politik yang dimiliki mereka, seperti lembaga keluarga (persekutuan genealogis), lingkungan fungsional spesial, dan lingkungan tempat tinggal (lingkungan territorial), cukup terandalkan dalam memberikan paket-paket pengetahuan politik. Sebagai individu yang secara turun temurun rata-rata bekerja sebagai nelayan, hal mana sebagian besar waktunya tercurahkan di laut, namun persoalan-persoalan lain, termasuk persoalan politik turut digelutinya. Ini berarti corak kehidupan keluarga mereka tidak hanya mengikuti perkembangan usaha pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga mengikuti persoalan-persoalan yang menyangkut masa depan, termasuk persoalan politik. Begitu pula hubungan sosial yang terjadi diantara sesama warga bukan hanya berkisar pada usaha pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menggeluti masalah-masalah lainnya, termasuk masalah politik.

Kondisi keberadaan masyarakat di kawasan pantai membentuk perkembangan mekanisme imitasi, intruksi, dan motivasi kearah yang positif. Terdapat figur yang jelas (*pongawa*) sebagai individu atau lembaga *patron* yang akan ditiru perilaku politiknya. Begitu pula dalam lingkungan mereka tidak hanya proses mobilisasi, tetapi juga telah terjadi suasana instruktif. Sehubungan dengan dua kondisi itu, masyarakat di kawasan pantai telah mulai bisa mengabstraksikan peristiwa-

peristiwa politik sebagai pengalaman berharga untuk membangkitkan motivasi.

## Pendapatan dan Pendidikan

### Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan yang diperoleh seseorang secara relatif berpengaruh terhadap segala aktivitas yang dilakukannya, termasuk aktivitas politiknya. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang secara relatif semakin tinggi pula partisipasi politiknya. Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan masyarakat pantai diukur dengan mengkategorisasi pendapatan mereka, yaitu kategori sangat rendah dengan tingkat pendapatan maksimal Rp. 99.500,-, kategori rendah adalah Rp.100.000,-, sampai dengan Rp. 199.500,-, kategori cukup Rp. 200.000,-, sampai dengan Rp. 299.500,-, kategori tinggi Rp. 300.000,-, sampai dengan Rp. 399.500,-, dan kategori sangat tinggi Rp. 400.000,- keatas.

Berdasarkan kategorisasi di atas, dari 150 responden, terdapat 34,7% sangat tinggi, 12% responden tinggi, 34% responden cukup, 18% responden rendah, dan hanya 1,3% responden sangat rendah tingkat pendapatannya. Responden yang memiliki tingkat pendapatan yang sangat tinggi rata-rata berasal dari kelompok *pongawa*, sementara responden yang memiliki pendapatan sangat rendah dan rendah rata-rata berasal dari kelompok nelayan mandiri yang menggunakan pancing, sedangkan responden yang memiliki tingkat pendapatan berkategori cukup dan tinggi rata-rata berasal dari kelompok *sawi*. Tingkat pendapatan para *sawi* dikontrol atau kebanyakan ditentukan oleh *pongawanya* dan tidak saling merugikan. Apabila terdapat satah satu pihak yang dirugikan disinilah terjadi pemutusan hubungan *pongawa-sawi* pada masyarakat pantai.

Dalam mengukur apakah ada korelasi antara tingkat pendapatan dengan partisipasi politik, maka kedua data tersebut dihubungkan dan dihitung dengan teknik statistik korelasi *product moment* dengan bantuan program SPSS+.

Hipotesis IV. Terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat pendapatan dengan partisipasi politik masyarakat pantai.

Hipotesis statistik :

$H_0 : p = 0 \rightarrow$  Tidak ada korelasi antara tingkat pendapatan dengan partisipasi politik masyarakat pantai.

$H_1 : p \neq 0 \rightarrow$  Ada korelasi antara tingkat pendapatan dengan partisipasi politik masyarakat pantai .

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi *product moment*  $r_x = 0,7759$  dengan nilai  $p = 0,000$  (output computer)  $< 0,05$  yang berarti hasil pengujian signifikan. Data mendukung adanya hubungan positif antara tingkatan sosial politik terhadap partisipasi politik, maka Hipotesis  $H_0$  ditolak dan Hipotesis  $H_1$  diterima. Berarti ada korelasi antara tingkat pendapatan dengan partisipasi politik masyarakat pantai, sehingga hipotesis IV yang telah dirumuskan diatas dapat diterima.

### Tingkat Pendidikan

Tingkat kualitas pendidikan masyarakat di kawasan pantai dapat digambarkan sebagai berikut : dari 150 responden, terdapat 2% tidak pernah sekolah, 30,7% berpendidikan SD, 56,7% berpendidikan SLTP, 7,3% berpendidikan SLTA, 3,3% berpendidikan D3 dan Sarjana. Dari data tersebut menunjukkan, tingkat pendidikan masyarakat di kawasan pantai masih rendah sebagai akibat dari rendahnya pendapatan mereka. Ini berarti tingkat pendidikan masyarakat di kawasan pantai dikontrol oleh tingkat pendapatan mereka.

Jika dilihat korelasi antara tingkat pendidikan dengan partisipasi politik masyarakat di kawasan pantai, maka diperoleh hasil  $r_x$  hitung sebesar 0,6837.

Hipotesis V. Terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi politik masyarakat pantai.

Hipotesis statistik :

$H_0 : P = 0 \rightarrow 0$  Tidak ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan partisipasi politik masyarakat pantai .

H1 :  $P \neq 0 \rightarrow$  Ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan partisipasi politik masyarakat pantai.

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi *product moment*  $r_x = 0,6837$  dengan nilai  $P = 0,000$  (output computer)  $< 0,05$  yang berarti hasil pengujian signifikan. Data mendukung adanya hubungan positif antara lingkungan sosial politik terhadap partisipasi politik, maka Hipotesis  $H_0$  ditolak dan Hipotesis  $H_1$  diterima. Berarti ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan partisipasi politik masyarakat pantai, sehingga hipotesis  $V$  yang telah dirumuskan di atas dapat diterima.

Masyarakat di kawasan pantai yang menganut nilai-nilai budaya Bugis-Makassar masih memiliki budaya politik paternalistik yang terwujud dalam pola hubungan *pongawa-sawi*, hal mana tingkat pendidikan mereka ditentukan oleh pendapatannya dan juga taraf pendapatannya ditentukan secara tidak langsung oleh *patron (pongawa)* terhadap *sawinya*. Artinya tingkat pendidikan mereka rendah karena pendapatannya juga masih rendah. Sementara itu, pendapatan mereka, terutama para *sawi* pada umumnya dikontrol atau ditentukan oleh pihak lain (*pongawa*), sehingga korelasi yang terjadi antara tingkat pendidikan dengan partisipasi politik masyarakat di kawasan pantai dikontrol secara tidak langsung oleh pendapatan mereka, dan juga oleh *pongawa* sebagai *patron*.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari uraian di atas, selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Partisipasi politik masyarakat pantai, meliputi : kegiatan pemberian suara (*voting*), kegiatan kampanye, kegiatan organisasi sosial dan politik, kontak dengan pejabat pemerintahan dan administratif (kontak politik langsung), diskusi-diskusi politik, dan kegiatan rapat-rapat umum, secara individual masih dominan bersifat

mobilisasi. Namun secara kelompok sudah berada dalam kategori tinggi.

2. Nilai-nilai utama sebagai inti budaya politik di kawasan pantai, meliputi : kejujuran (*alempureng*), kepandaian (*amaccang*), kewajaran (*asitinajang*), keteguhan (*agatengeng*), dan daya upaya (*akkaresong*). Pelanggaran nilai ini dalam kegiatan politik dikualifikasikan sebagai *siri'* dan untuk mana cenderung menjadi rahasia bagi kelompok yang bersangkutan.
3. Tingkah laku politik, sikap pandangan, dan nilai-nilai politik ponggawa secara keseluruhan diikuti oleh para *sawi* pengikutnya. Hubungan sosial antara ponggawa dengan *sawi* yang terjalin sejak dulu masih tetap terpelihara dan dipertahankan sampai sekarang bukan saja di bidang ekonomi, melainkan juga di bidang politik.
4. Terdapat saling pengaruh atau korelasi positif antara budaya politik dengan partisipasi politik dalam masyarakat pantai. Budaya politik masyarakat pantai bersifat paternalistik, masyarakat memandang pemimpinnya *cq ponggawa* sebagai panutan yaitu sosok yang patut didengar dan diteladani.
5. Hasil analisis keterkaitan antara lingkungan sosial politik dengan partisipasi politik, mendukung adanya hubungan positif antara keduanya. Kondisi lingkungan sosial politik demikian ini mendukung kelangsungan proses sosialisasi politik di dalam kelompok-kelompok sosial.
6. Terdapat korelasi positif antara tingkat pendapatan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat pantai. Demikian pula antara tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi politik.
7. Budaya politik masyarakat pantai nampak tak banyak mengalami perubahan dalam irama politik Orla dan Orba, dan dalam era Reformasi ini, nampak disanksikan dan ada upaya untuk meninggalkan.
8. Dalam Era Reformasi khususnya sejak Mei 1998 sebagai simbol tumbanganya Orde Baru, pandangan politik masyarakat di

kawasan pantai mengalami perubahan ke arah yang lebih positif. Mereka memandang kejadian-kejadian politik bukan hanya yang dimotori pemerintah dapat membawa kebaikan dan keuntungan tetapi juga kejadian politik yang bukan dimotori pemerintah. Pada skala nasional terbukanya kesempatan untuk mengemukakan pendapat dengan adanya kebebasan pers, penegakan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Kebebasan membentuk partai-partai politik terbuka sehingga dalam tahun 1999 lebih banyak partai politik (48) yang ikut pemilu dibanding dengan sebelumnya hanya 3 partai politik ikut pemilu. Proses demokratisasi berjalan dengan adanya kesempatan masyarakat untuk memilih alternatif partai politik yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi politiknya.

9. Sistem pemilihan umum selama Orde Baru yang dikenal dengan sistem proporsional dan sistem daftar sangat menguntungkan Golkar sehingga setiap pemilu (enam kali pemilu Orde Baru) selalu dimenangkan Golkar dengan suara terbanyak mutlak yang biasa disebut mayoritas tunggal (*single majority*). Kemenangan Golkar tersebut antara lain disebabkan adanya kewajiban pegawai negeri sipil (PNS-KORPRI) menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golkar, tetapi juga karena Golkar didukung oleh pemerintah dan ABRI, demikian sehingga dua partai lainnya (PPP dan PDI) tergesur ke pinggiran.

#### Saran-saran

1. Untuk meminimalkan aspek mobilisasi, maka peran serta organisasi sosial dan politik terutama partai-partai politik sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat demi terciptanya partisipasi otonom. Partai-partai politik diharapkan mendirikan cabang-cabangnya ataupun perwakilannya di desa-desa untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat desa dan sebagai wadah

penyaluran aspirasi masyarakat termasuk masyarakat di kawasan pantai.

2. Sistem pemilihan umum dengan sistem proporsional sebaiknya digantikan oleh sistem distrik pada pemilihan yang akan datang (mulai Pemilu 2004). Demikian halnya dengan pemilihan presiden sebaiknya dipilih langsung oleh rakyat sehingga demokrasi benar-benar dilaksanakan. Langkah awal yang harus ditempuh untuk menerapkan sistem pemilihan yang dimaksud adalah melakukan amandemen terhadap beberapa aturan perundang-undangan, antara lain amandemen UUD 1945J khususnya pasal 6 ayat 2 ; amandemen UU No. 2 tahun 1999 tentang partai politik ; amandemen UU No.3 tahun 1999 tentang pemilihan umum ; dan amandemen UU No.4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
3. Program perbaikan kampung yang pernah dilakukan pemerintah sebaiknya dilanjutkan dan diutamakan bagi masyarakat di kawasan pantai yang bekerja sebagai nelayan yang berpendapatan rendah. Program tersebut telah membawa dampak positif, terutama dalam hal mobilisasi penduduk. Pada aspek ekonomi, program perbaikan kampung perlu dilakukan dengan meningkatkan kualitas pekerjaan melalui pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian modal kerja bagi nelayan berpendapatan rendah berupa Kredit Usaha Nelayan (KUN), atau pemberian dana Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan ditangani secara sungguh-sungguh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agger, R. E. and V. Ostrom. 1956. *Indicators Of Political Participation* (Ed.) *Political Behavior A Reader In Theory and Research*, Cornell University Press, New York.

- Ahimsa Putra, Heddy Shri. 1988. *Minawang : Pola Hubungan Patron Klien Masyarakat Sulawesi Selatan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Alfian. 1983. *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia: Kumpulan Karangan*. Gramedia, Jakarta-
- 1986. *Pemilihan Umum dan Prospek Pertumbuhan Demokrasi Pancasila*, dalam seri PRISMA, LP3ES, Jakarta.
- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1984. *The Civic Culture, Political Behaviour and Democracy in The Five Countries (Terj. S. Simamora) Budaya Politik : Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Bina Aksara, Jakarta.
- Apter, David E. 1985. *Pengantar Analisa Politik*. Rajawali, Jakarta.
- Arif Tiro, Muhammad, 1999. *Uji Eksak Fisher Sebagai Alternatif Analisis Chi- Kuadrat*, Hasanuddin University Press, Makassar.
- 2000. *Analisis Regresi dengan Data Kategori*, Makassar State University Press, Makassar.
- Bachtiar, Harsja W. (at. al.) 1988. *Masyarakat Dan Kebudayaan*. Jambatan, Jakarta.
- Basuni, Firdaus. 1981. *Tidak Ada Penilaian Lain Studi Tentang Pandangan Nelayan Terhadap Kerja di Pulau Balang Lompo*. PLPIIS UNHAS, Ujung .Pandang .
- Boissevain, J. 1966. *Poverty and Politics in a Sicilian Agro-Town*. International Archives of Ethnography.
- Bolong, Zainuddin. 1987. *Partisipasi Politik Kaum Nelayan : Studi Kasus Di Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. P3MP YIIS UNHAS, Ujung Pandang.
- Corbin, R. 1966. *Social Class and Patron Clientage in Andalusia : Some Problems in comparing ethnographies*. Anthropological Quarterly.
- Eisenstadt, S.N. dan L. Roniger. 1980. *Patron-Client Relations as a Model of Structuring Social Exchange*. Comparative Studies in Society and History .
- Foster, G.M. 1963. *The Dyadic Contract in Tzintzuntzan II : Patron-Client Relationship*. American anthropologist.
- Harvey, Barbara Sillars. 1984. *Pemberontakan Setengah Hati*. Graffiti Press, Jakarta-
- Huntington, Samuel P. 1975. *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press, New Haven, Connecticut.
- Koentjaraningrat (ed.) 1971. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta-
- Maryanov, Gerald S, 1958. *Desentralization in Indonesia as a Political Problem*, Interim Reports Series, Modern Indonesian Project, South East Asia Program, Department of Far Eastern Studies, Ithaca, Cornell University, New York.
- Mas'oe'd, Mochtar dan Colin MacAndrews. 1983. *Perbandingan Sistem Politik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mattulada, A. 1975. *Latoa : Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta.
- 1981. *Perwilayahan Pembangunan : Motif dan Pilihan Masalah pada Simposium Nasional Pengembangan Wilayah, Ilmu dan Teknologi dan Strategi Pembinaan* Universitas Perguruan Tinggi. UNHAS, Ujung Pandang.
- Milbraith L.W. 1965. *Political Participation*. Rend Mc Nally, Chicago.
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Mubiyarto (dkk), 1984. *Nelayan dan Kemiskinan Studi Ekonomi dan Antropologi di Dua Desa Pantai*. CV. Rajawali, Jakarta.
- Pelras, Christian. 1981. *Hubungan Patron-Klien Dalam Masyarakat Bugis dan Makassar*. Stensilan PLPIIS, Ujung Pandang.
- Rahim, H. A. Rahman. 1985. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. LEPHAS, Ujung Pandang.
- Resusun, D. 1976. *Dayung Basah Periuk Bensi : Studi Tentang Beberapa Aspek Ekonomi Nelayan di Pulau Sembilan Ujung Pandang*. PLPIIS UNHAS, Ujung Pandang.
- Sallatang, M. A. 1976. *Desa Pantai di Sulawesi Selatan dan Strategi Pengembangannya*. Team Studi Pedesaan UNHAS, Ujung Pandang.
- 1982. *Ponggawa-Sawi : Suatu Studi Sosiologi Kelompok Kecil*. Disertasi Doktor, UNHAS, Ujung Pandang.
- Sallatang, M. A. Dan Hasan Walinono. 1985. *Pranata-Pranata Sosial dalam Masyarakat Pantai di Sulawesi Selatan*. Dalam Komunikasi dan Pembangunan, disunting oleh AS, Achmad dan SS, Ecip, Sinar Harapan, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi (ed.) 1985. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta.
- Syamsuddin, Nazaruddin. 1989. *Integrasi Politik Indonesia*. Gramedia, Jakarta.
- Uphoff, N. T. and M. J. Esman. 1974. *Local Organization for Rural Development: Analysis Of Asian Experience*. Ithaca, Cornell University, New York.
- Vredembregt, J. 1983. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta.
- Walinono, Hasan. 1979. *Tanete : Suatu Studi Sosiologi Politik*. UNHAS, Disertasi Doktor, Ujung Pandang.
- Waris, Irwan. 1994. *Elite di Sulawesi Selatan, (Studi Tentang Peranan Elite Lokal Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat)*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta.

Weiner, Myron (ed.) 1971. Political Participation: Crisis of The political Process, dalam Leonard Binder (et al). Crisis and Sequences in Political Development, Princetown University Press.